

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 menciptakan guncangan ekonomi global melalui perlambatan aktivitas bisnis. Kondisi ini semakin diperburuk dengan diterapkannya pembatasan mobilitas, sehingga masyarakat yang bergantung pada sektor informal kehilangan sumber pendapatan mereka. Dampak dari situasi ini paling dirasakan oleh masyarakat rentan yang membuat mereka kesulitan dalam mengakses kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan dan pendidikan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat bahwa Pandemi Covid-19 menjerumuskan 119 sampai 124 juta orang dalam jurang kemiskinan ekstrim. Situasi ini menjadikan Pandemi Covid-19 sebagai salah satu krisis ekonomi paling parah setelah Depresi Besar (Sunge et al., 2024).

Kemiskinan yang terjadi selama Covid-19 berpeluang pada peningkatan pekerja anak (UNICEF, 2020). Hal ini disebabkan oleh rumah tangga yang berada pada kondisi dibawah garis kemiskinan merespon guncangan ekonomi dengan memprioritaskan anak mereka untuk bekerja dibandingkan bersekolah (Bandara et al., 2015). Orang tua dari keluarga miskin seringkali melihat anak-anak mereka sebagai aset ekonomi, sehingga mempekerjakan anak menjadi salah satu cara mereka untuk mengatasi kemerosotan ekonomi. Selain itu, penutupan sekolah selama Pandemi Covid-19 menyebabkan hilangnya akses pendidikan, sehingga memaksa anak untuk bekerja demi membantu ekonomi keluarga (ILO, 2020).



Gambar 1. 1 Persentase Kemiskinan dan Pekerja Anak di Indonesia Tahun 2019–2024

Sumber : BPS, 2025

Gambar 1.1 menampilkan data mengenai kemiskinan dan pekerja anak di Indonesia tahun 2019-2023. Pada tahun 2020, saat pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,97 persen yang disertai dengan peningkatan jumlah pekerja anak yaitu sebesar 0,9 persen. Pada tahun 2021 hingga 2023, persentase kemiskinan dan pekerja anak terus mengalami penurunan hingga mencapai 9,36 persen dan 2,39 persen. Tahun 2024 kemiskinan terus mengalami penurunan sebesar 1,21 persen dan berhasil berada dibawah persentase kemiskinan sebelum pandemi Covid-19. Disaat yang sama, persentase pekerja anak mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 0,46 dibandingkan tahun 2023 dan jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan pada data diatas dapat diamati bahwa, meskipun kemiskinan sudah mengalami penurunan tetapi angka pekerja anak masih tinggi bahkan mengalami peningkatan.

Peningkatan pekerja anak sering dihubungkan dengan penurunan kualitas modal manusia karena anak-anak tidak memiliki kesempatan yang penuh dalam mengenyam pendidikan (Hidayatina & Garces-Ozanne, 2019). Pekerja anak menjadi tindakan yang mengeksploitasi anak-anak dengan melibatkan mereka

dalam segala bentuk pekerjaan yang dapat merampas masa kecil mereka dan menghalangi akses mereka untuk bersekolah secara teratur, sehingga berdampak negatif pada perkembangan keterampilannya. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan akan membuat mereka cenderung bergabung dalam pekerjaan dengan upah yang rendah di masa depan. Pada akhirnya, mereka akan sulit meningkatkan kualitas hidup dan terus terjatuh dalam lingkaran kemiskinan.

Permasalahan pekerja anak harus segera ditangani oleh pemerintah mengingat dampak negatifnya terhadap keberlangsungan kehidupan anak. Studi ISER (2021) menunjukkan bahwa semakin lama anak-anak tidak bersekolah, semakin kecil kemungkinan mereka untuk kembali melanjutkan pendidikan. Hal ini sejalan dengan temuan ILO (2020) yang menegaskan bahwa ketika anak-anak mulai bekerja dan putus sekolah, maka mereka akan sulit untuk kembali ke sekolah. Kondisi ini menuntut intervensi pemerintah yang efektif demi memastikan pemenuhan hak pendidikan pada anak.

Program perlindungan sosial menjadi langka konkrit untuk menjawab permasalahan pekerja anak di Indonesia (ILO, 2020; UNICEF, 2020). Secara umum, program perlindungan sosial dibagi menjadi dua yaitu bantuan tunai bersyarat (*Conditional Cash Transfer/CCT*) dan bantuan tunai tidak bersyarat (*Unconditional Cash Transfer/UCT*). Bantuan tunai bersyarat dinilai lebih efektif dibandingkan dengan bantuan tunai tidak bersyarat dalam mengatasi permasalahan pekerja anak (Dammert et al., 2018). Hal ini karena CCT memberikan bantuan tunai dengan syarat tertentu, seperti kehadiran anak di sekolah, sehingga secara langsung mendorong anak untuk tetap sekolah dan mengurangi kemungkinan anak untuk bekerja.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk CCT yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan anak dikalangan masyarakat rentan dan miskin di Indonesia. Peningkatan partisipasi pendidikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mengurangi kemungkinan anak untuk terlibat

bekerja baik di dalam maupun di luar rumah tangga, sehingga anak dapat lebih fokus pada kegiatan yang berkaitan dengan sekolah (Hidayatina & Garces-Ozanne, 2019). Kebijakan ini diharapkan mampu menurunkan angka pekerja anak dengan mekanisme penggantian upah anak dengan bantuan tunai (efek pendapatan) dan pengalihan waktu yang seharusnya digunakan anak-anak untuk bekerja menjadi waktu belajar di sekolah (efek substitusi) (Meza-Cordero, n.d, 2022).

Penelitian mengenai dampak CCT terhadap pekerja anak di berbagai negara menunjukkan hasil yang beragam. Rawlings & Rubio (2005) menemukan bahwa CCT di Maroko berhasil menurunkan prevalensi pekerja anak sekaligus meningkatkan partisipasi pendidikan. Attanasio et al. (2010) melaporkan bahwa penerapan CCT di Kolombia berhasil mengurangi pekerja anak pada sektor domestik, tetapi tidak berdampak signifikan pada pekerjaan ekonomi seperti pertanian atau industri. Sementara itu, penerapan CCT di Nikaragua terbukti efektif tidak hanya dalam menurunkan kemungkinan anak bekerja, tetapi juga dalam mengurangi jam kerja mingguan mereka (Gee, 2010).

Beberapa penelitian juga mengungkapkan keterbatasan program CCT dalam menekan angka pekerja anak. Penelitian di Filipina menunjukkan bahwa meskipun CCT berhasil meningkatkan partisipasi sekolah, program ini tidak signifikan mengurangi keterlibatan anak dalam bekerja (Galang, 2016). Meza-Cordero (2022) juga menemukan kondisi serupa di Kosta Rika, di mana implementasi CCT tidak berdampak pada penurunan pekerja anak. Studi di Brazil bahkan menemukan bahwa penerimaan program CCT memiliki probabilitas lebih tinggi menjadi pekerja anak dibandingkan dengan anak yang tidak menerima program tersebut (Pais et al., 2017). Penemuan ini menunjukkan ketidakmampuan CCT dalam mengatasi akar permasalahan pekerja anak, dimana tekanan ekonomi yang ekstrim memaksa rumah tangga berpenghasilan rendah tetap mengandalkan tenaga kerja anak meskipun telah menerima program bantuan tunai bersyarat.

Studi empiris di Indonesia juga telah mengkaji dampak program CCT terhadap penurunan angka pekerja anak. Ibrahim & Wisana (2023) mengidentifikasi disparitas efektivitas CCT pada periode sebelum dan saat Pandemi Covid-19. Ia menemukan keberhasilan program dalam mengurangi pekerja anak sebelum pandemi, namun saat terjadinya pandemi CCT tidak memberikan dampak yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak menerima program CCT, tekanan ekonomi akibat pandemi tetap mendorong mereka untuk bekerja. Candrawati & Auwalin, (2024) memperkaya analisis dampak CCT terhadap pekerja anak dengan mengungkapkan dampaknya terhadap perbedaan wilayah. Pada pedesaan, PKH belum mampu memberikan dampak untuk menekan angka pekerja anak, baik sebelum pandemi maupun saat pandemi berlangsung. Hasil yang menarik ditemukan di wilayah perkotaan, dimana anak yang menerima CCT cenderung berpartisipasi dalam pekerja anak. Ia menyoroti adanya sifat rumit dari efektivitas program perlindungan sosial dalam mengurangi pekerja anak.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian terdahulu mengenai dampak PKH terhadap pekerja anak di Indonesia masih terbatas pada periode sebelum dan selama Pandemi Covid-19. Padahal, situasi sosial-ekonomi pasca pandemi mengalami perubahan yang signifikan, termasuk dalam hal kerentanan rumah tangga terhadap praktik pekerja anak. Penelitian ini akan memfokuskan analisis pada dampak PKH terhadap pekerja anak setelah terjadinya Pandemi Covid-19. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terkini bagi pemerintah dalam merumuskan strategi perlindungan sosial yang responsif guna memitigasi pekerja anak di Indonesia setelah terjadinya guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Penulis akan mengangkat judul **“ANALISIS DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP PEKERJA ANAK PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah disusun, maka pada bagian ini penulis akan merancang rumusan masalah:

1. Bagaimana profil dan karakteristik pekerja anak di Indonesia?
2. Bagaimana profil dan karakteristik penerima Program Keluarga Harapan (PKH)?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerima Program Keluarga Harapan (PKH)?
4. Bagaimana dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pekerja anak pasca pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menganalisis profil dan karakteristik pekerja anak di Indonesia.
2. Menganalisis profil dan karakteristik penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Menganalisis dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pekerja anak pasca pandemic Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada segi kebijakan, akademisi, sosial dan ekonomi. Manfaat dari penelitian diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Empiris

- a. Memberikan informasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam menyempurnakan penerapan PKH di Indonesia, terutama dampaknya terhadap pengurangan pekerja anak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pengurangan pekerja anak di Indonesia, khususnya memastikan bahwa PKH mampu meningkatkan partisipasi anak-anak untuk bersekolah.

2. Manfaat Akademisi

- a. Menambah literatur ilmiah terkait dengan dampak PKH dalam mengurangi pekerja anak di Indonesia.
- b. Memberikan metodologi dan hasil analisis untuk dapat dikembangkan untuk menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama dalam bidang kebijakan publik dan sumber daya manusia.

